

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE
TERHADAP INDIKASI TERJADINYA FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)

**THE EFFECT OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND SHARIA COMPLIANCE ON
FRAUD INDICATION IN ISLAMIC BANKS IN INDONESIA**

(Empirical Study on Islamic Banks in the Period of 2014-2017)

**Karina Amanna Fadhistri¹, Dedik Nur Triyanto, S.E., M.Acc.²
Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Telkom**

¹karinaaf@students.telkomuniversity.ac.id ²dediknurtriyanto@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Bank Syariah sebagai entitas yang memiliki karakter khusus memiliki tantangan yang lebih tinggi dalam pengelolaannya dimana seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip Islami. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim seharusnya berpotensi lebih besar dalam mengembangkan Bank Syariah. Namun minat masyarakat terhadap Bank Syariah jauh lebih sedikit dibandingkan Bank Konvensional. Munculnya isu-isu terkait *fraud* pada Bank Syariah semakin menambah keraguan masyarakat akan prinsip Islami dalam Bank Syariah. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian para pelaku usahanya dalam aspek kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) maupun tata kelolanya (*Islamic Corporate Governance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya risiko *fraud*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governace* dan *Sharia Compliance* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017. Variabel independen yang digunakan yaitu *Islamic Corporate Governace* dan *Sharia Compliance* dengan dengan Proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio*. Variabel dependen yang digunakan ialah *fraud* pada Bank Umum Syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2014 sampai dengan 2017. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini terdapat 11 Bank Umum Syariah dengan periode penelitian 4 tahun sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 44. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik yang diolah menggunakan SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah, *Shariah Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya *frud* pada Bank Umum Syariah. Sedangkan *Shariah Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *frud* pada Bank Umum Syariah.

Kata kunci : *sharia compliance, Islamic corporate governace, fraud, Bank Syariah*

Abstract

Islamic banks as an entities that have special characteristics have a higher challenge in their management where all operational activities are based on Islamic principles. Indonesia as a country with a majority of Muslims should have greater potential in developing Islamic banks. However, public interest in Islamic banks is less than conventional banks. The emergence of issues related to fraud on Islamic banks has increasingly added to public doubts about the Islamic principles in Islamic banks. So caution is needed in the business actors in the aspects of sharia compliance and its governance as an effort to prevent the possibility of fraud risk.

This study aims to examine the effect of Islamic Corporate Governace and Sharia Compliance on indications of fraud occurring in Indonesia's Islamic Banks for the period 2014-2017. The independent variables are Islamic Corporate Governace and Sharia Compliance with the Proxy of Islamic Income Ratio and Profit Sharing Ratio. The dependent variable is fraud in Islamic Commercial Banks.

The population in this study were all Islamic Banks that registered in the Financial Services Authority in the period 2014 to 2017. The samples were selected using the purposive sampling method. In this study there were 11 Islamic Commercial Banks with a 4 year research period so that the total sample used in this study amounted to 44. The analytical method used in this study was logistic regression which was processed using SPSS version 22. The results of this study indicate that the Islamic Corporate Governance variable has a positive influence on indications of fraud occurring in Islamic Commercial Banks, Shariah Compliance with the Proxy Profit Sharing Ratio has a negative influence on indications of frud occurrence in Islamic Commercial Banks while Shariah Compliance with the proxy of Islamic Income Ratio has no effect on the indications of the occurrence of fruds in Islamic Commercial Banks.

Keywords: *sharia compliance, Islamic corporate governace, fraud, Islamic Bank*

1. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan segala kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang tercantum pada Al – Quran dan Hadist¹. Oleh karena itu, semua transaksi pada bank syariah harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam fiqh muamalah. Masalah yang sering dihadapi Bank Syariah diantaranya kurangnya keyakinan masyarakat untuk mempercayakan dananya karena keraguan akan prinsip syariah pada Bank Syariah dimana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan².

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh The Pew Forum on Religion & Public Life, Pada tahun 2018 di Dunia terdapat 49 Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim. Salah satunya adalah Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 209 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi. Dengan tingginya jumlah masyarakat Muslim di Indonesia seharusnya membuka peluang bagi Perbankan Syariah untuk memiliki pangsa pasar yang tidak kalah dengan Bank Konvensional. Namun, kenyataannya di Indonesia kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah masih sangat kurang dibandingkan Bank Konvensional, Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK *market share* Bank Syariah pada Juni 2018 hanya 5,8% dari jumlah *market share* bank konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Bank Syariah masih sangat rendah.

Selama ini Evaluasi kinerja Bank Syariah cenderung memprioritaskan aspek aspek keuangan saja dimana seharusnya Bank Syariah juga tidak melupakan aspek aspek Islami yang perlu diterapkan pada Bank Syariah. Apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan? kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di Perbankan Syariah. Seperti kasus korupsi yang di lakukan oleh Direktur utama Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 lalu terkait pembiayaan fiktif (Kompas.com 21/11/17). Kemudian Bank Syariah Mandiri yang diduga menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp.1,1 T (CNNIndonesia 14/02/18) hal tersebut jelas memberikan dampak negatif tidak hanya kepada perusahaan namun kepada pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank syariah. Dengan demikian, Bank Syariah sebagai *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak bertindak berdasarkan prinsipnya. Lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat mempengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Salah satu cara untuk meminimalkan konflik antara agen dan prinsipal adalah dengan pengungkapan corporate governance dan kepatuhan Syariah³. Hameed (2004) menyatakan bahwa untuk memenuhi kepatuhan bank syariah direkomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan berlandaskan tiga indikator pengungkapan islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*².

Islamic Corporate Governance yaitu prinsip tata kelola secara Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Namun terdapat resiko yang unik dan tidak terdapat di lembaga keuangan konvensional, yaitu resiko syariah dimana operasionalnya mengadopsi nilai dan prinsip Islam dan disetujui oleh komite syariah sehingga untuk memperkecil terjadinya resiko maka lembaga harus memiliki tata kelola yang baik dalam praktik syariah⁴. Dengan diterapkannya tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip Islami seharusnya dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi.

Sharia compliance dalam penelitian ini menggunakan indikator yang termasuk dalam *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan oleh Hameed (2004), indikator tersebut yaitu, *Islamic Income Ratio* (IIR) dan *Profit Sharing Ratio* (PSR). *Islamic Income Ratio* merupakan rasio pendapatan Islami yang diterima Bank Syariah³. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam seharusnya akan mengurangi tindak kecurangan yang terjadi karena ketika Bank Syariah lebih mematuhi prinsip Islami dalam pengelolaan dananya dan mengurangi pendapatan yang bukan berdasarkan prinsip Islami diharapkan dapat meminimalisir kecurangan. Sedangkan *Profit Sharing Ratio* merupakan rasio pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dilakukan bank terhadap total pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah³. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*⁵ sebagai inti dari kegiatan pada Bank Syariah. Ketika Bank Syariah lebih banyak melakukan pembiayaan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan dan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan karena lebih menggerakkan sektor riil sehingga menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul:

“PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI TERJADINYA FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”.

2. DASAR TEORI DAN METODELOGI

2.1 *Fraud* pada Bank Syariah

fraud merupakan “suatu tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal”⁶. Pada Bank Umum Syariah setiap internal *fraud* yang terjadi pada tahun berjalan akan diungkapkan dalam laporan GCG masing-masing Bank Syaiah⁶ bahwa penyimpangan pada Bank Syariah wajib diungkapkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gregorius (2015) Indikasi terjadinya *fraud* dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang dikategorikan menjadi dua, yaitu kode 1 untuk perusahaan yang terbukti telah melakukan *fraud* yang telah terbukti dalam pengungkapan laporan gcg dan kode 0 terhadap perusahaan yang tidak melakukan *fraud*.

2.2 Islamic Corporate Governance

Islamic Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang idealnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan mengkomodasikan seluruh pemangku kepentingan secara adil². Dengan adanya dewan syariah yang bertanggung jawab sebagai pengawas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank Syariah diwajibkan secara berkala untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*⁸. Dengan cara penilaian berdasarkan 11 Faktor yang disimpulkan menjadi nilai komplitas kemudian hasil penilaian tersebut menjadi peringkat (1 sampai 5) dimana semakin kecil peringkatnya maka semakin baik dalam pelaksanaan tata kelolanya.

2.3 Sharia Compliance

Makna kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam Bank Syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan, perbankan serta bisnis lain yang terkait⁴. Bank Syariah perlu mematuhi aturan syariah dalam praktik operasionalnya di lapangan. *Sharia compliance* adalah indikator yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

2.1.5.4 Islamic Income Ratio (IIR)

Pendapatan Islam merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Islam serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam³. Prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian serta hal haram lainnya dan hanya melakukan transaksi yang bersifat halal. Bank Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan *GCG*⁹. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah³ baik pendapatan operasional dan non operasional dan pendapatan halal maupun non halal. Rasio untuk menghitung pendapatan Islam yang dilakukan bank syariah meliputi jumlah pendapatan Islam yang meliputi pendapatan bank sebagai *mudharib* dibagi dengan total pendapatan yang dirumuskan sebagai berikut:

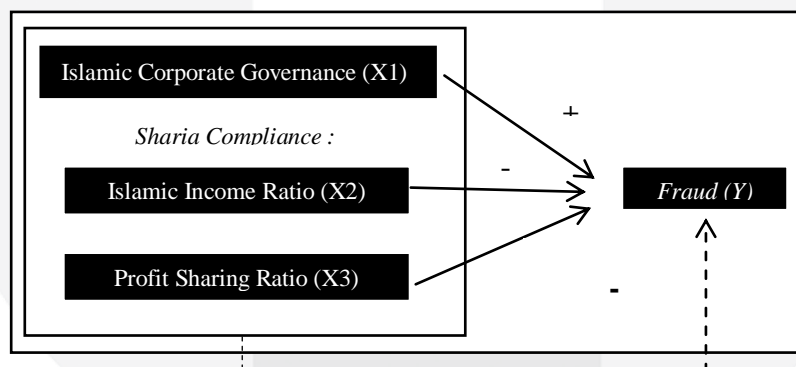
$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan Islami Bank Syariah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2.1.6.5 Profit Sharing Ratio (PSR)

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*⁵. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dibagi dengan total pembiayaan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :
 ——— Hubungan secara parsial
 - - - - - Hubungan secara stimulan

3. METODELOGI PENELITIAN

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* dan variabel dependen yang menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Indikasi terjadinya fraud. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2017. Sampel pada penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2017 yang kemudian dipilih dengan memenuhi syarat sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau *judgement sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan model regresi logistik.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen berupa indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Syariah, serta variabel independen berupa *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio*. Pada penelitian ini analisis deskriptif dibedakan menjadi dua karena terdapat data berskala nominal dan rasio. Analisis deskriptif untuk data berskala nominal menggunakan bentuk frekuensi dan presentase, sementara analisis deskriptif untuk data berskala rasio menggunakan mean, standar deviasi, titik minimum dan titik maksimum. Berikut merupakan tabel analisis statistik deskriptif dengan skala rasio.

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif Data Rasio

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IIR	44	,561	,997	,91880	,09385
PSR	44	,007	1,00	,45307	,28063

(Sumber: Data yang telah dolah, 2019)

Variabel *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* memiliki data berskala rasio sehingga analisis deskriptif kedua variabel tersebut menggunakan mean, standar deviasi, titik minimum dan titik maksimum. Pada penelitian ini data tersebut dapat jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 4.1, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *Islamic Income Ratio* memiliki nilai terendah 0,561 dan nilai tertinggi 0,997 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 0,91880 dan standar deviasi sebesar 0,09385. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data *Islamic Income Ratio* berkelompok dan tidak bervariasi atau tidak menyebar jauh dari rata-ratanya.

Kemudian hasil analisis statistik deskriptif pada variabel *Profit Sharing Ratio*, menunjukkan nilai terendah adalah 0,007 dan nilai tertinggi 1,00 dengan nilai rata-rata sebesar 0,45307 dan standar deviasi sebesar 0,28063. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data *Profit Sharing Ratio* tidak bervariasi atau berkelompok.

Islamic Corporate Governance dan Indikasi terjadinya *fraud* pada penelitian ini merupakan data berskala nominal sehingga menggunakan analisis deskriptif bentuk frekuensi dan presentase.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Islamic Corporate Governance

Predikat	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	8	18%
Baik	22	64%
Cukup Baik	8	18%
Kurang Baik	0	0
Tidak Baik	0	0
	44	100,0

(Sumber: Data yang telah dolah, 2019)

Pada penelitian ini, dari 44 sampel Bank Syariah dalam 4 tahun periode penelitian rata-rata Bank Syariah bernilai komplisist 1,5 hingga 2,5 yaitu, sebanyak 22 dari 44 sampel atau 64% yang berarti lebih banyak Bank Syariah dengan *Islamic Corporate Governance* yang berpredikat "Baik". Selain itu, tidak terdapat Bank Syariah dengan predikat buruk atau bernilai komplisist lebih dari 3,5. Berarti pada penelitian ini tidak terdapat Bank Syariah dengan predikat "Buruk" ataupun "Sangat Buruk" dalam pelaksanaan *Islamic Corporate Governance*.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Indikasi Terjadinya Fraud

	Frekuensi	Persentase (%)
Non-Fraud	16	36.3
Fraud	28	63.6
Total	44	100.0

(Sumber: Data yang telah dolah, 2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel indikasi terjadinya *fraud* dari 44 sampel Bank Umum Syariah, sebanyak 16 sampel atau 36,3% tidak terindikasi terjadinya *fraud*. Sedangkan sebanyak 28 sampel atau 63,6% yang terindikasi melakukan kecurangan atau terindikasi terjadinya *fraud*.

4.1.2 Analisis Regresi Logistik

4.1.2.1 Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit)

Dalam pengujian kelayakan model regresi dapat digunakan *Hosmer and Lameshow Test*. Uji ini digunakan untuk mengukur kelayakan model yang akan digunakan dalam penelitian¹⁰. Kelayakan regresi dapat dinilai dengan *goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada bagian bawah uji *Hosmer and*

Lemeshow harus menunjukkan angka probabilitas > 0.05 , atau H_0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Hal ini berarti model regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya atau dapat diartikan model fit¹⁰.

Tabel 4.8
Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11,844	8	,158

(Sumber: Output SPSS data yang diolah)

Berdasarkan hasil *Hosmer and Lemeshow Test* pada tabel 4.6, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,158. Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa hipotesis nol diterima dan model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya atau dapat diartikan model fit.

4.1.2.2 Pengujian Keseluruhan Model

Pengujian keseluruhan model bertujuan untuk menentukan apakah model menjadi lebih baik jika ditambahkan variabel bebas¹¹. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood awal (block number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood awal (block number = 1). Model dikatakan *fit* secara keseluruhan jika terjadi penurunan nilai -2 Log Likelihood (-2LL)

Tabel 4.10
Pengujian Keseluruhan Model

Overall Model Fit Test (-2LogL)	
-2LogL Block Number = 0	57,684
-2LogL Block Number = 1	44,661

(Sumber: Data yang telah diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 4.7 uji kelayakan dengan memperhatikan angka pada -2Log Likelihood (LL) Block Number = 0, sebesar 57,684 dan angka pada -2Log Likelihood (LL) Block Number = 1, sebesar 44,661. Hal tersebut berarti bahwa adanya selisih antara kedua -2 Log Likelihood, artinya penambahan variabel bebas ke dalam model fit dapat memperbaiki model fit. Penurunan Likelihood menunjukkan model regresi logistik yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

4.1.2.3 Koefisien Determinasi (*Cox and Snell R Square Dan Nagelkerke R Square*)

Pengujian koefisien determinasi memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang dilibatkan dalam penelitian terhadap variabel dependen¹². Besarnya nilai koefisien determinasi ditentukan berdasarkan nilai *Nagelkerke R Square*

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	44,661 ^a	,256	,351

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

(Sumber: Output SPSS data yang diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.8, didapatkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,351. Hal ini dapat diartikan bahwa kombinasi *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* mampu menjelaskan pendeteksian variabel indikasi terjadinya *fraud* sebesar 35%. Sedangkan 65% pendeteksian indikasi terjadinya *fraud* dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.1.2.4 Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat¹². Pengujian koefisien regresi menggunakan uji nilai statistik dalam tabel *variabel in the equation*. Koefisien regresi ditentukan dalam kolom B tabel *variabel in the equation*, dan mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi. Dalam analisis ini dilakukan uji simultan variabel dengan melihat nilai *Omnibus Test of Model Coefficients* pada saat dilakukannya analisis regresi ini¹². Dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan keseluruhan variabel bebas apakah secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05) yang dapat dilihat pada output SPSS yaitu *Omnibus Test of Model Coefficients* yang setara dengan Uji F. Jika nilai *Omnibus Test of Model Coefficients* kurang dari 5% berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Menguji Koefisien Regresi
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	13,021	3	,005
	Block	13,021	3	,005
	Model	13,021	3	,005

(Sumber: Output SPSS data yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 didapatkan tingkat signifikansi keseluruhan variabel bebas sebesar 0,005 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian secara simultan *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*.

4.1.2.5 Pengujian Pengaruh Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05). Hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dilihat pada *Output SPSS yaitu variable in equation*¹³.

Tabel 4.13
Pengujian Pengaruh Parsial
Variables in the Equation

		B	S.E.	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	ICG	2,079	,836	,013	7,994
	IIR	-2,856	3,269	,382	,058
	PSR	-3,885	1,662	,019	,021
	Constant	1,404	3,436	,683	4,072

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.

(Sumber: Output SPSS data yang diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.14, diperoleh hasil regresi logistik sebagai berikut:

1. Koefisien regresi dari Exp(B) untuk konstanta sebesar 4,072 menyatakan bahwa jika variabel independen yang diwakili indikator *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* maka kemungkinan memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* sebesar 4,072 kali.
2. Koefisien regresi dari Exp(B) untuk indikator *Islamic Corporate Governance* (X1) sebesar 7,994 menyatakan bahwa setiap perubahan 1 satuan pada nilai komplot *Islamic Corporate Governance*, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan naik sebesar 7,994 kali. Koefisien *Islamic Corporate Governance* 2,079 dengan signifikansi sebesar 0,013 yang berarti bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.
3. Koefisien regresi dari Exp(B) untuk indikator *Islamic Income Ratio* yang merupakan pendapatan islami terhadap total pendapatan sebesar 0,058 menyatakan bahwa setiap perubahan 1 satuan pada nilai *Islamic Income Ratio*, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan *fraud* keuangan turun sebesar 0,058 kali. Koefisien *Islamic Income Ratio* -2,856 dengan signifikansi sebesar 0,382 yang berarti bahwa *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.
4. Koefisien regresi dari Exp(B) untuk indikator *Profit Sharing Ratio* sebesar 0,21 menyatakan bahwa setiap perubahan 1 satuan pada nilai *Profit Sharing Ratio*, maka kemungkinan Bank Syariah untuk melakukan *fraud* turun sebesar 0,21 kali. Koefisien *Profit Sharing Ratio* -3,885 dengan signifikansi sebesar 0,019 yang berarti bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.

4.2 Pembahasan Pengaruh Parsial

4.2.1 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap indikasi terjadinya *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik *Islamic Corporate Governance* menunjukkan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis Ha1 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* secara parsial berpengaruh dalam indikasi terjadinya *fraud* dengan arah positif. Hubungan antara *Islamic Corporate Governance* dengan indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah yaitu, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haifa (2016) bahwa tindakan *fraud* dapat terjadi karena kurangnya tata kelola yang baik. Berdasarkan teori agensi bahwa Bank Syariah dalam menjalani bisnisnya memiliki kewajiban tata

keolola dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah sehingga adanya *Islamic Corporate Governance* diharapkan dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi. Apabila penerapan tata kelola dan prinsip syariah pada Bank Syariah telah baik maka dapat memberikan indikasi bahwa Bank Syariah terhindar dari praktik kecurangan atau *fraud*. Penerapan tata kelola pada Bank Syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan *GCG* bagi Bank Syariah dijelaskan bahwa semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nelly (2018) dan Abdi (2017) bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* yang berarti pengimplementasian mekanisme internal dan eksternal *Corporate Governance* dengan memperhatikan dan menjalankan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

4.2.2 Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap indikasi terjadinya *fraud*

Hasil uji regresi logistik *IIR* menunjukkan nilai signifikansi 0,382 lebih besar dari 0,05. Tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis H_{a1} ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* secara parsial tidak berpengaruh dalam indikasi terjadinya *fraud*. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, secara teoritis bahwa ketika Bank Syariah mematuhi dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah dengan mengurangi pendapatan non halal atau riba diharapkan dapat meminimalisir kecurangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2017) dijelaskan bahwa ketika nilai pendapatan Islam tinggi maka jumlah *fraud* yang terjadi rendah, hal tersebut berarti ketika bank syariah melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah atau semakin tinggi tingkat kepatuhan Bank Syariah maka semakin rendah *fraud* yang terjadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haifa (2016) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*.

4.2.3 Pengaruh *Profit Sharnng Ratio* terhadap indikasi terjadinya *fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi logistik *PSR* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,019. Tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis H_{a1} diterima berarti bahwa secara parsial *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, secara teoritis ketika Bank Syariah lebih banyak melakukan pembiayaan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2017) bahwa beberapa *agency problem* yang ditemui dalam *mudharabah* antara lain adanya konflik kepentingan dimana *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan prinsipnya. Sehingga ketika prinsip bagi hasil dalam bank syariah telah dilakukan secara baik dan sesuai syariah diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan karena lebih menggerakkan sektor riil dan menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif. Sehingga ketika prinsip bagi hasil dominan pada bank syariah maka *fraud* semakin kecil, dengan demikian maka kepatuhan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil mencegah terjadinya kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah yang terindikasi *fraud* memiliki kecenderungan *Profit Sharnng Ratio* yang dibawah rata-rata dan sebaliknya, Bank Syariah yang tidak terindikasi *fraud* memiliki kecenderungan *Profit Sharnng Ratio* yang diatas rata-rata. Sejalan dengan konsep pemikiran bahwa semakin tinggi nilai *Profit Sharnng Ratio* maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haifa (2016) dan Marheni (2017) bahwa Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Syariah.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan terhadap 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan konsisten mempublikasikan laporan tahunannya selama tahun 2014-2017. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Omnibus Test of Model Coefficients*, secara simultan *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*.
2. Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. *Islamic Corporate Governance* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah dengan arah positif.
 - b. *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* secara parsial tidak berpengaruh dalam indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.
 - c. *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* secara parsial berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah dengan arah negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64 /POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Jakarta, Indonesia: OJK.
- [2] Ansori, (2014). Implementasi *Islamic Corporate Governace* dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), 90-102.
- [3] Marheni. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan *Fraud* pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 143-173.
- [4] Rusdiana & Aji Sapaji (2018). *Auditing Syari'ah*. Bandung : Pustaka Setia
- [5] Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- [6] *International Standards on Auditing (ISA) 240* (2009)
- [7] Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs/2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta, Indonesia: BI.
- [8] OJK. (2016). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta, Indonesia: OJK.
- [9] OJK. (2016). Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs/2010 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta, Indonesia: OJK.
- [10] Latan, Hengky. (2014). Aplikasi *Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan STATA*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Santoso, S. (2017). *Statistik Multivariate dengan SPSS*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- [12] Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivarians dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [12] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- [14] Abdi, Saputra. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kecurangan (*Fraud*) perbankan syariah. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1), 48-55.
- [15] Nelly, Baqiyatussa'idah. (2018). Pengaruh Sharia Compliance DAN Islamic Corporate Governance Terhadap Kecurangan di Bank Syariah Indonesia Periode 2012-2016. Repository Fakultas Ekonomi UNISSULA
- [16] Rahmayani dan Rahmawaty (2017) Pengaruh *Islamic Corporate Governace* dan *Internal Control* terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIMEKA* (2) 3, 18-38.